



KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PERENCANAAN

1. Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan studi yang telah dikemukakan di depan, maka hasil penelitian secara evaluatif dari Bab I sampai Bab IV dapat disimpulkan:

Proyek Fasilitas Kredit Industri Kecil sebagai pilihan intervensi pemerintah, ditujukan untuk golongan ekonomi lemah yang memiliki usaha industri sebagai kelompok sasaran. Analisa strata sosial-ekonomi dari rumah tangga industri yang terkena proyek, dengan variabel: luas lahan, kualitas fisik rumah dan jumlah tenaga kerja yang terlibat proses produksi; menunjukkan bahwa proyek ini mencapai kelompok sasaran. Tingkat pencapaian sampai 78,3 persen atau lebih dari tiga perempat debitur, yang dapat dikriteriakan sebagai kelompok sasaran.

Penggunaan kredit Industri Kecil sebagai akumulasi asas manfaat proyek FKIK, dengan angka penggunaan untuk usaha industri 85,0 persen dapat dikatakan debitur tidak semuanya menginvestasikan kedalam usaha industri. Angka penyimpangan 15,0 persen adalah angka yang besar, dilihat dari debitur yang dikhususkan pada rumah tangga industri. Faktor eksternal, internal dan struktural mempengaruhi dalam pengambilan keputusan pengusaha dan pengrajin.

Penggunaan kredit untuk usaha industri pedesaan dengan input utama bahan baku dijumpai sebesar 90,0 persen dengan tingkat penggunaan kredit menengah ke atas sebesar 68,3 persen; sedangkan industri pedesaan dengan input utama tenaga kerja penggunaan kedalam usaha industri sebesar 80,0 persen dengan tingkat penggunaan menengah ke atas sebesar 50,0 persen. Analisis tingkat penggunaan kredit diperoleh hasil Kai-kuadrat sebesar 7,68115 dengan signifikansi 0,0215; menunjukkan tingkat penggunaan kredit yang signifikan. Penggunaan kredit untuk usaha industri



pedesaan dengan input utama bahan baku lebih tinggi dibandingkan dengan industri dengan input utama tenaga kerja.

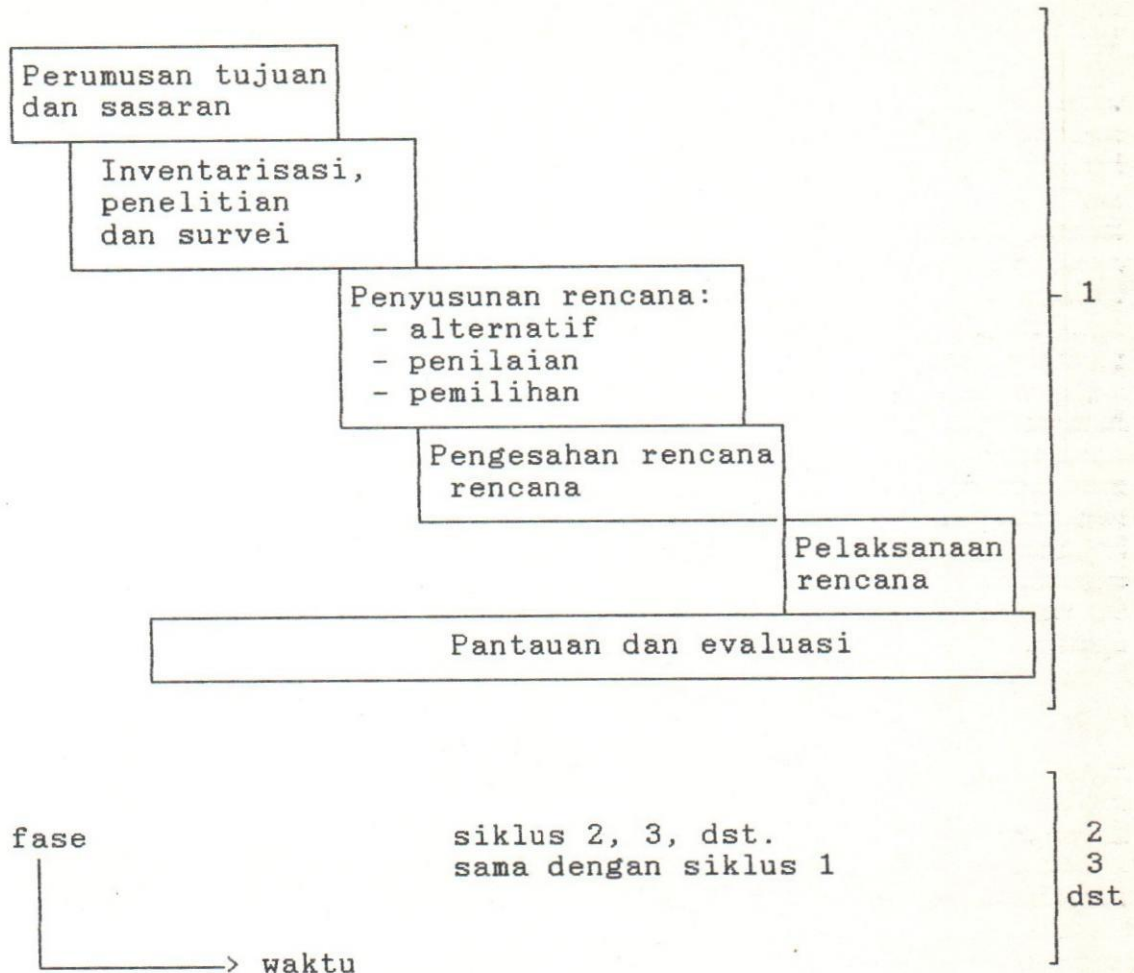
Efektivitas Proyek Fasilitas Kredit Industri Kecil dengan dua variabel: strata sosial-ekonomi dan tingkat penggunaan kredit, diperoleh hasil tingkat efektivitas pada kelas sedang dengan menunjuk pada angka 75,8 persen. Tingkat efektivitas proyek pada kelas menengah disebabkan oleh: a) strata sosial-ekonomi dari rumah tangga debitur sesuai dengan kriteria kelompok sasaran proyek dan, b) tingkat penggunaan kredit pada kelas menengah ke bawah.

2. Implikasi Terhadap Perencanaan

2.a. Teori perencanaan

Perencanaan didefinisikan sebagai pemilihan intervensi atau kegiatan yang dipertimbangkan untuk memulai dan mengemudikan proses perubahan struktural ke arah yang diinginkan (Luning, 1987). Dalam sifatnya merupakan proses yang berkesinambungan, dengan fase evaluasi sebagai jembatan antara dua siklus perencanaan. Evaluasi menempatkan pada bagian penelitian dan inventarisasi dalam siklus berikutnya (Dusseldorp, 1980). Pendekatan proses dalam perencanaan ini, merupakan sebuah strategi untuk mengembangkan wilayah yang mengarah pada "*self-sustainability*" yang optimal dan mengurangi kemiskinan secara langsung melalui sebuah usaha pemberian pertolongan kepada organisasi dan penduduk untuk menetapkan dan memecahkan masalah-masalah mereka secara aktif. Untuk mencapai tujuan atau hasil perencanaan, dalam proses dan siklusnya dapat ditemukan pada gambar 5.1.

Rangkaian kegiatan yang harus dilakukan seperti pada gambar di atas, harus dikerjakan secara berurutan karena setiap kegiatan merupakan prasyarat untuk kegiatan selanjutnya. Siklus kegiatan perencanaan selalu berulang, sehingga secara teoritik perencanaan berikutnya akan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Informasi kekurangan dan kelebihan perencanaan sebelumnya merupakan bahan yang mem-



Gambar 5.1: Siklus Perencanaan

Sumber : Dusseldorp, 1980.

berikan kontribusi bermanfaat untuk perencanaan berikutnya, dan ditemukan dalam tahap evaluasi.

Menurut Sterkenburg (1987), evaluasi berkenaan dengan prosedur dan kegiatan yang ditujukan pada pengontrolan proses perencanaan dan menilai apakah proses tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan apakah tujuannya telah dicapai. Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses perencanaan. Evaluasi didefinisikan sebagai analisis pengaruh dan dampak proyek, program atau kebijaksanaan; dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan dan terutama dinyatakan dalam tujuan-tujuannya.



Studi tentang evaluasi ini secara umum memiliki tiga unsur yang mencerminkan intensitas dari evaluasi, yaitu:

- efisiensi : - apakah kegiatan dilaksanakan secara efisien,
- efektivitas : - sejauh mana keberhasilan kegiatan dalam mencapai tujuan,
- dampak : - apakah hasil yang lebih luas dan berjangka panjang dari kegiatan, dalam kaitannya dengan tujuan kebijaksanaan.

2.b. Kredit dalam pendekatan kebijaksanaan

Penelitian ini termasuk dalam tahapan evaluasi, sehingga hasil penelitian dapat menjadikan bahan masukan terhadap para perencana dan pembuat kebijaksanaan dalam perencanaan berikutnya. Berkaitan dengan pembangunan industri pedesaan di Kabupaten Bantul, intervensi Proyek FKIK ditujukan juga untuk meningkatkan kerja sama terpadu dalam pengembangan industri pedesaan tersebut. Oleh karena itu, studi evaluatif tentang Proyek FKIK dengan penekanan (*stressing*) efektivitas proyek, dapat meberikan dasar pengembangan. Meskipun demikian dalam dinamika dan kompleksitas faktual dari Proyek FKIK ini, perlu ditempatkan dalam "*persepsi - dialektik*" yang seimbang, sehingga dapat terhindarkan dari ketidaktentuan pola dan strategi pembangunan pedesaan secara keseluruhan. Kemiskinan pedesaan tidak berdiri terpisah, banyak unsur yang saling kait-mengkait didalamnya baik yang bersifat internal, eksternal dan struktural.

Implikasi penelitian ini terhadap perencanaan khususnya pengembangan industri pedesaan, menyangkut dalam hal perbaikan dan pengembangan pada sisi-sisi kekurangan dan keberhasilan Proyek FKIK. Proyek yang ditujukan untuk membantu permodalan dalam usaha industri, dalam prktek di tingkat bawah pengrajin dan pengusaha menunjukkan penyimpangan 15,0 persen. Hal ini berarti



sebesar 85,0 persen pengguna kredit yang memanfaatkan untuk usaha industri, dengan suatu catatan pada tingkat penggunaan kredit menengah kebawah, yaitu 42,5 persen untuk tingkat menengah dan 40,8 persen untuk tingkat bawah. Munculnya angka ini, menunjukkan bahwa proyek fasilitas permodalan tersebut kurang dimanfaatkan. Hasil penelitian yang mengungkapkan penggunaan kredit pada tingkat menengah ke bawah ini, terdapat banyak unsur yang mengakibatkannya. Unsur keterbelakangan yang melekat dalam kegiatan industri pengrajin dan pengusaha, perlu didudukan sebagai unsur yang mempengaruhi keputusan penggunaan kredit.

Pembinaan terhadap industri pedesaan, akhirnya tidak terlepas dari kompleksitas permasalahan di pedesaan. Keterbatasan dalam berproduksi yang seharusnya tertolong dari paket-paket proyek selama ini, ternyata banyak berhenti sampai tingkat tambahan pengetahuan pengrajin dan pengusaha. Implementasi yang lemah di tingkat bawah adalah permasalahan umum pedesaan, yang menuntut konprehensif tindakan pembangunan. Khusus proyek-proyek yang menyangkut pembanguna industri dalam pengamatan penulis sedikit-banyak telah memberi pengaruh dilihat dari cara produksi, desain dan lainnya. Permasalahannya tingkat inovasi yang dijalankan di tingkat bawah kurang berjalan. Dalam hal ini Proyek FKIK bersangkutan dengan proyek-proyek tersebut, khususnya dalam penggunaan kredit.

Kebijaksanaan pembangunan industri pedesaan selama ini dapat dibedakan dalam tiga pendekatan, menurut Chuta dan Sethurahman (1984), yaitu.

- Pendekatan "pengembangan pedesaan terpadu" (integrated rural development approach), yang pada dasarnya merupakan keseluruhan strategi untuk pengembangan yang efektif dan berimbang dari satu daerah; pertanian manufaktur dan kegiatan-kegiatan tersier dan material infrastruktur dipadukan dalam kerangka keruangan terpadu, pada umumnya memfokuskan



pada perencanaan pusat pedesaan. Karenanya dalam pendekatan IRD ini industrialisasi dilekatkan pada kerangka pengembangan pedesaan yang lebih luas dan merupakan bagian dari keseluruhan jajaran tindakan sosial-ekonomi yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi kehidupan di daerah-daerah pedesaan.

- Pendekatan "berorientasi permasalahan" (problem-oriented approach), satu jenis kebijakan yang dirancang untuk mendukung industri-industri pedesaan dengan mengeliminir kemacetan yang ada. Jenis kebijakan ini memusatkan pada pemberian satu atau lebih unsur-unsur yang hilang, seperti membuat fasilitas kredit, bantuan dalam mencari pasar, kursus ketrampilan dan manajemen.
- Pendekatan "sektoral" (sectoral approach), lebih diarahkan pada pengembangan sektor industri pedesaan secara keseluruhan. Pendekatan sektoral berusaha untuk tidak hanya mengatasi permasalahan tertentu; tetapi juga berusaha untuk memperbaiki produksi dan lingkungan produksi. Dalam mendukung usaha sektoral, langkah-langkah tambahan sering diambil seperti mendirikan kawasan industri untuk industri-industri pedesaan dan pemberian subsidi-subsidi khusus; pembebasan pajak temporer atau intensif lain yang sesuai.

Dari pendekatan di atas, pembangunan industri pedesaan dengan komoditi-perkomoditi perlu tambahan catatan bahwa pengambilan keputusan pada tingkat bawah (pengrajin dan pengusaha) mempunyai posisi yang strategis. Dari hasil penelitian menunjukkan, industri dengan input utama keahlian tenaga kerja yang lebih banyak mendominasi sebagai komoditi andalan, ditemukan lebih rendah dalam tingkat penggunaan kredit dibandingkan industri dengan input utama bahan baku.

Fasiliias kredit kasus industri pedesaan di Kabupaten Bantul, akhirnya perlu diletakkan sebagai pendekatan sektoral (sectoral approach). Dia tidak dapat berdiri sendiri (sebagai pendekatan problem-oriented approach)



dalam pencapaian perbaikan usaha industri pedesaan secara menyeluruh. Seperti yang dibahas di atas, faktor keterbelakangan yang menjadi ciri industri pedesaan menjadi masalah yang perlu penanganan secara komprehensif, atau pemecahan keterbelakangan industri pedesaan tidak hanya dilihat dari penyediaan kredit. Hal ini menjadikan hasil yang telah dicapai Proyek FKIK, terikat juga keberhasilan proyek-proyek lainnya.

2.c. Kelompok sasaran (target group)

Golongan ekonomi lemah dengan kegiatan usaha industri berskala kecil, merupakan golongan yang ditentukan sebagai kelompok sasaran. Pengertian kelompok sasaran dibatasi sebagai golongan dalam masyarakat yang seharusnya terkena atau memperoleh manfaat proyek. Dalam kasus Proyek FKIK di Kabupaten Bantul, kelompok ini dalam tercakupan dalam pembinaan Dinas Perindustrian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa proyek sampai pada kelompok yang dimaksudkan dengan pencapaian 78,3 persen, atau dapat diartikan pula sebesar 21,7 persen debitur tidak termasuk dalam sebagai kelompok sasaran. Hal ini dapat terjadi, karena sistem perekrutan nasabah tidak terdapat batasan tegas berapa ukuran golongan ekonomi lemah yang dimaksudkan.

Merujuk variabel yang dipakai dalam analisis strata sosial-ekonomi dalam penelitian ini, perlu dipakai dalam perekrutan nasabah, yaitu variabel luas penguasaan lahan. Hal yang melatar belakangi variabel tersebut penting, adalah kondisi masyarakat di Kabupaten Bantul dekat dengan usaha pertanian, dan ditemukannya data bahwa debitur yang menempatkan usaha pertanian sebagai kegiatan pokok sebesar 31,8 persen dan sebesar 40,8 persen menempatkan pada kegiatan sampingan. Hal ini menguatkan pendapat bahwa industri pedesaan bersifat komplementer terhadap usaha pertanian. Dari Tabel 4.1. debitur sebesar 84,2 persen



menguasai lahan dibawah 0,25 Ha, dan kelompok ini yang seharusnya terkena proyek.

2.d. Tenaga penyuluh lapangan

Pola pencarian nasabah dengan dua jalur: lewat tenaga penyuluh lapangan dan sentra industri, menghasilkan pencapaian pada kriteria kelompok sasaran. Metoda "*gethok tular*" yang digunakan menunjukkan keefektipan, karena masyarakat desa merupakan "*face to face group*" dimana mereka saling mengenal (Bintarto, 1983). Meskipun demikian, perlu dihindari penyimpangan resipien pada golongan atas atau elite desa. Metoda "*gethok tular*" sebagai strategi pembinaan memiliki juga sifat kerentanan dari tujuan, dengan sifat ketidak formalannya.

Dalam pencarian nasabah dan pembinaan tingkat bawah di atas, menuntut adanya tenaga penyuluh lapangan yang ulet, mengingat permasalahan yang kompleks tersebut. Tenaga penyuluh lapangan merupakan ujung tombak pengembangan industri pedesaan yang harus ditingkatkan kualitas dan jumlahnya. Menurut Soedjito Sosrodihadjo (1977), kurangnya tenaga penyuluh lapangan salah satu penyebab ketertinggalan pengembangan industri pedesaan.

Pembangunan industri pedesaan yang berhasil tergantung terutama pada pengetahuan dan pemahaman yang seksama atas kondisi-kondisi lokal, kebutuhan-kebutuhan dan potensi-potensi. Karenanya, staf penyuluh lokal seharusnya tidak hanya memiliki hubungan kerja yang baik dengan pengusaha-pengusaha lokal dan penguasa-penguasa lokal, perlu jalinan kerja dengan badan-badan yang bersangkutan-paut dan bekerja di daerah tersebut. Keberhasilan tidak lagi dibebankan pada departemen yang membidangi, tetapi keterpaduan tindakan pembangunan di tingkat bawah (Otto Verkoren, 1991).